

ABSTRAK

PENGAWASAN PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI DAERAH

Oleh

Dani Abdillah

Kewenangan perizinan usaha perikanan tangkap di daerah serta pengawasannya terus berubah secara dinamis sesuai dengan kebaharuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bisa menimbulkan persoalan dan polemik hukum terutama di tingkat pemerintah daerah. Permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1). Menganalisa bagaimanakah kewenangan perizinan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis resiko di subsektor penangkapan ikan dan 2). Menganalisa bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis risiko subsektor penangkapan ikan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam perizinan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dari 0 sampai dengan 12 mil laut sehingga semua perizinan sub sektor penangkapan ikan di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi sedangkan Pemerintah kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan perizinan hanya untuk perairan umum daratan. (2) Kewenangan pengawasan dalam pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya perikanan berdasarkan undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya memberi wewenang kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Perikanan Provinsi yaitu di bidang Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha penangkapan ikan yang beroperasi dari 0 mil laut sampai dengan 12 mil laut, akan tetapi hingga hari ini pengawasan usaha penangkapan ikan di daerah masih belum optimal dengan dihadapkan pada persoalan berkaitan dengan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang belum memadai dan tidak optimalnya dukungan politik dan hukum untuk memberi payung hukum berkaitan penerapan sanksi terhadap pelanggaran di bidang usaha perikanan tangkap di daerah sesuai kewenangannya serta masih rendahnya kompetensi pengawas perikanan yang ada di daerah baik dari sisi teknis maupun kemampuan dalam pemahaman terhadap perundang-undangan bidang perikanan.

Kata kunci: Kewenangan, , Perizinan, Penangkapan Ikan, Pengawasan.

ABSTRACT

SUPERVISION OF LICENSING IN THE MARINE AND FISHERIES SECTOR ON CAPTURE FISHERIES BUSINESS ACTIVITIES IN THE REGION

By

Dani Abdillah

The authority of capture fisheries business licensing in the region as well as its supervision continues to change dynamically in accordance with the novelty of the applicable laws and regulations that can cause legal problems and polemics, especially at the local government level. The problems are formulated as follows: 1). Analyze how the licensing authority of the local government in the management and utilization of risk-based fisheries resources in the fishing subsector and 2). analyze how the authority of the local government in supervising the management and utilization of risk-based fisheries resources in the fishing subsector. The method used is normative research method with statute approach and case approach. The results of this study are (1) The authority of the provincial government in licensing the management and utilization of fisheries resources based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government from 0 nautical miles to 12 nautical miles so that all licensing of the fishing sub-sector is carried out by the Provincial Government while the district / city government only has licensing authority only for inland public waters. (2) Supervisory authority in the management and utilization of fisheries resources based on the Regional Government law and the Job Creation law along with its derivative regulations authorizes the provincial government in this case the one stop integrated investment and licensing service and the Provincial Maritime and Fisheries Service in the field of Marine Resources and Fisheries Supervision to carry out supervisory activities of fishing businesses oprating from 0 nautical miles to 12 nautical miles, However, until today the supervision of fishing business in the regions is still not optimal by facing problems related to inadequate institutional supervision of marine and fisheries resources and not optimal political and legal support to provide a legal umbrella related to the imposition of sanctions against violations in the field of capture fisheries business in the regions according to their authority and the low competence of fisheries supervisors in the regions both in terms of technical and ability to understand fisheries legislation.

Keywords: Authority, Licensing, Fishing, Supervision.